

**UNIVERSITAS WIDYA MATARAM**

PROGRAM STUDI: HUKUM

**RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER**

<b>MATA KULIAH: HUKUM LAUT INTERNASIONAL</b>	<b>KODE MATA KULIAH: HK 402</b>	<b>RUMPUN MATA KULIAH: HUKUM INTERNASIONAL</b>	<b>BOBOT (SKS): 2 SKS</b>	<b>SEMESTER: 4</b>	<b>TANGGAL PENYUSUNAN: 15 AGUSTUS 2022</b>
<b>OTORISASI Ketua Prodi</b>	<b>DOSEN PENGEMBANG RPS: 1. <b>Suyikati, SH., M.Kn</b> 2. <b>Fifink Praiseda Alviolita, S.H., M.H.</b></b>	<b>KOORDINATOR RMK:</b>			<b>Kaprodi</b>
<b>CAPAIAN PEMBELAJARAN</b>	<b>CAPAIAN PEMBELAJARAN PRODI</b>	Mahasiswa mampu berkomunikasi dengan media lisan dan tulisan secara baik dan benar (BERISIKAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN:) 1. SIKAP 2. KETERAMPILAN UMUM 3. KETERAMPILAN KHUSUS 4. PENGETAHUAN			
	<b>CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH</b>	<b>SIKAP DAN TATA NILAI</b>			
		<b>S.01</b>	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius;		
		<b>S.02</b>	Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama,moral, dan etika;		
		<b>S.03</b>	Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila;		
		<b>S.04</b>	Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa;		
		<b>S.05</b>	Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain;		
<b>S.06</b>	Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;				

		<b>S.07</b>	Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara;
		<b>S.09</b>	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
		<b>S.10</b>	Menginternalisasi semangat kerakyatan (adil, egaliter, dan demokratis), kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan.
		<b>KETERAMPILAN UMUM</b>	
		<b>KU.01</b>	Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya
		<b>KU.02</b>	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
		<b>KU.03</b>	Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni, menyusun deskripsi saintifik hasil kajiannya dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi
		<b>KU.04</b>	Menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut diatas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi
		<b>KU.05</b>	Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data
		<b>KU.06</b>	Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya
		<b>KU.07</b>	Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya
		<b>KU.08</b>	Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri
		<b>KU.09</b>	Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi
		<b>KETERAMPILAN KHUSUS</b>	
		<b>KK.01</b>	Mampu berpikir yuridis untuk menganalisis dan membangun argumentasi atau penalaran hukum dalam rangka menemukan dan menerapkan hukum untuk memecahkan kasus-kasus hukum

		<b>KK.02</b>	Mampu melakukan penelitian dan penulisan hukum sesuai prinsip etika akademik atau mengembangkan ilmu hukum dan hukum positif.
		<b>KK.04</b>	Mampu menerapkan ilmu hukum dalam pekerjaan yang ditekuni baik sebagai akademisi atau praktisi hukum
		<b>PENGETAHUAN</b>	
		<b>P.03</b>	Menguasai substansi hukum (hukum pidana, hukum perdata, hukum internasional, hukum tata usaha negara, hukum tata negara).

DESKRIPSI SINGKAT MATA KULIAH:	Sebagai matakuliah wajib bagi semua Perguruan Tinggi di Indonesia, matakuliah Hukum Laut Internasional mengkaji dan menganalisis secara teoritik perkembangan berbagai Pemikiran, Konsep, dan Teori Hukum Laut Internasional untuk (1) mengkritisi Kebijakan Kelautan Nasional Indonesia; (2) melahirkan konsep-konsep hukum baru, sebagai dasar perumusan teori hukum laut internasional yang baru; (3) mengkaji pemikiran-pemikiran hukum laut internasional yang berpengaruh kuat dalam pengembangan substansi dan penerapan hukumnya di tingkat domestik; (4) pengembangan metode kajian dan penelitian hukum laut internasional, dan (5) Kontribusi Kajian Hukum Laut Internasional dalam Menjawab kedaulatan maritim negara yang berkembang sangat cepat, dinamis, mendasar, dan semakin kompleks.	
MATERI PEMBELAJARAN/POKOK BAHASAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ruang lingkup mata kuliah hukum laut internasional.</li> <li>2. Sejarah perkembangan hukum laut Internasional.</li> <li>3. Berbagai istilah dalam hukum laut Internasional.</li> <li>4. Kebijakan Kelautan Nasional Indonesia</li> <li>5. Strategi dan Program RI serta Prinsip-Prinsip yang melandasi Visi Indonesia untuk menjadi Negara Maritim yang maju, mandiri, kuat dan mampu berkontribusi secara positif bagi perdamaian dan keamanan regional dan global.</li> <li>6. latar belakang di balik Lahirnya Peta Terbaru NKRI serta Pemberian Nama Laut Natuna Utara.</li> <li>7. Kedaulatan maritim Indonesia.</li> <li>8. Kebijakan Indonesia terhadap Tantangan Keamanan di Laut.</li> <li>9. Kasus kepemilikan pulau-pulau Sipadan dan Ligitan dan Delimitasi Maritim di Ambalat.</li> </ol>	
PUSTAKA	UTAMA	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hasjim Djalal, Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Dasawarsa 1990, diterbitkan tahun 1997.</li> <li>2. Hasjim Djalal, Hak Berdaulat dan Kedaulatan Yurisdiksi RI.</li> <li>3. Peta ALKI dan Penyuluhan Hukum 1998.</li> <li>4. Peraturan Presiden RI No.78 Tahun 2005 mengenai Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar.</li> <li>5. Peraturan Pemerintah RI No.37 Tahun 2002 mengenai ALKI.</li> <li>6. Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 2002 tentang Daftar Koordinat Geografis Titik-Titik Garis Pangkal Kepulauan Indonesia.</li> </ol>	

	<p>7. Adrianus Meliala, dkk, <i>Kompendium Keamanan Laut Buku I</i>, 2016.</p> <p>8. Adrianus Meliala, dkk, <i>Kompendium Keamanan Laut Buku II</i>, 2016.</p> <p>9. Maritime Review, <i>Momentum Menyelesaikan Masalah Mendasar Di Laut Sebagai Prasyarat Terwujudnya Negara Maritim Yang Maju</i>, 2017.</p>
	<p>PENDUKUNG</p> <p>1. Journal of East Asia and International Law Volume 10 Number 1.</p> <p>2. Journal of East Asia and International Law Volume 12 Number 1.</p>
MEDIA PEMBELAJARAN	Powerpoint, Internet, Jurnal
TEAM TEACHING	
MATA KULIAH SYARAT	-

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I	Mahasiswa mampu memahami tentang ruang lingkup mata kuliah hukum laut internasional	Pembukaan mata kuliah (mahasiswa menyepakati kontrak perkuliahan) dan mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan ruang lingkup mata kuliah hukum laut internasional	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemutakhiran literatur</li> <li>• Ketepatan menguraikan materi</li> <li>• Kemampuan bertanya dan mengemukakan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perkenalan</li> <li>• Kuliah Interaktif</li> <li>• Penelusuran Pustaka</li> </ul>	Pembukaan kuliah menjelaskan tentang: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontrak perkuliahan</li> <li>2. Identitas mata kuliah</li> <li>3. Sasaran belajar</li> <li>4. Ruang lingkup mata kuliah</li> </ol>	3 %
II & III	Mahasiswa mampu memahami tentang sejarah perkembangan hukum	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan sejarah perkembangan hukum laut Internasional.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan menguraikan perkembangan hukum laut</li> <li>• Kemampuan bertanya dan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuliah Interaktif</li> <li>• <i>Think Pair Share</i></li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sejarah perkembangan hukum laut internasional</li> <li>2. Sejarah perkembangan hukum</li> </ol>	8 %

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN )	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	laut Internasional.		mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun		laut indonesia	
IV & V	Mahasiswa mampu memahami tentang berbagai istilah dalam hukum laut Internasional.	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan berbagai istilah dalam hukum laut Internasional.	•Ketepatan menguraikan berbagai istilah dalam hukum laut internasional. • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun	• Kuliah Interaktif • Think Pair Share	1. Archipelagic State 2. Archipelagic Outlook 3. Indonesian Maritime Continent 4. World Maritime Fulcrum	12%
VI & VII	Mahasiswa mampu memahami tentang Kebijakan Kelautan Nasional Indonesia.	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis Kebijakan Kelautan Nasional Indonesia.	• Ketepatan menganalisis materi • Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat • Kedisiplinan dan sopan santun	• Kuliah Interaktif • <i>Think Pair Share</i>	1. Pengelolaan Sumber Daya Kelautan dan Sumber Daya Manusia; 2. Pertahanan Keamanan, Penegakan Hukum, dan Keselamatan di Laut; 3. Tatakelola dan Kelembagaan Laut; 4. Ekonomi, Infrastruktur, dan Peningkatan	10 %

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN )	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					Kesejahteraan; 5. Pengelolaan Ruang Laut dan Perlindungan Lingkungan Laut; 6. Budaya Bahari; 7. Diplomasi Maritim	
VIII	<b>MID SEMESTER</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan menjawab soal</li> <li>• kejujuran</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ujian Tulis</li> </ul>	<b>MID SEMESTER</b>	15%
IX & X	Mahasiswa mampu memahami tentang Strategi dan Program RI serta Prinsip-Prinsip yang melandasi Visi Indonesia untuk menjadi Negara Maritim yang maju, mandiri, kuat dan mampu berkontribusi secara positif bagi	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis Strategi dan Program RI serta Prinsip-Prinsip yang melandasi Visi Indonesia untuk menjadi Negara Maritim yang maju, mandiri, kuat dan mampu berkontribusi secara positif bagi perdamaian dan keamanan regional dan global	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan menganalisis materi.</li> <li>• Kemampuan bekerjasama dalam kelompok</li> <li>• Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat</li> <li>• Kedisiplinan dan sopan santun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Small Group.</i></li> <li>• <i>Discussion</i></li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wawasan Nusantara.</li> <li>2. Pembangunan Berkelanjutan;</li> <li>3. Ekonomi Biru;</li> <li>4. Pengelolaan Terintegrasi dan Transparan;</li> <li>5. Partisipasi;</li> <li>6. Kesenjangan;</li> <li>7. Pemerataan</li> </ol>	8 %

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN )	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	perdamaian dan keamanan regional dan global					
XI	Mahasiswa mampu memahami tentang latar belakang di balik Lahirnya Peta Terbaru NKRI serta Pemberian Nama Laut Natuna Utara	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis latar belakang di balik Lahirnya Peta Terbaru NKRI serta Pemberian Nama Laut Natuna Utara	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan menganalisis materi</li> <li>• Kemampuan bekerjasama dalam kelompok</li> <li>• Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat</li> <li>• Kedisiplinan dan sopan Santun.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuliah nteraktif</li> <li>• <i>Problem Based Learning</i></li> </ul>	Berbagai perjanjian internasional yang mengatur perbatasan maritim antara RI dan berbagai Negara tetangga.	5%
XII	Mahasiswa mampu memahami tentang kedaulatan maritim Indonesia	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis kedaulatan maritim Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan menganalisis materi</li> <li>• Kemampuan bekerjasama dalam kelompok</li> <li>• Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat</li> <li>• Kedisiplinan dan sopan Santun.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuliah Interaktif</li> <li>• <i>Small Group Discussion</i></li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Posisi geografis</li> <li>2. wilayah perairan yang sangat luas</li> <li>3. Karakter dan budaya maritime</li> <li>4. Kekuatan Armada Laut.</li> </ol>	5%

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN )	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
XIII & XIV	Mahasiswa mampu memahami tentang Kebijakan Indonesia terhadap Tantangan Keamanan di Laut	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan Kebijakan Indonesia terhadap Tantangan Keamanan di Laut	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan menguraikan Kebijakan Indonesia terhadap Tantangan Keamanan di Laut</li> <li>• Kemampuan bekerjasama dalam kelompok</li> <li>• Kemampuan bertanya dan mengemukakan pendapat</li> <li>• Kedisiplinan dan sopan santun.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuliah Interaktif</li> <li>• <i>Small Group Discussion</i></li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penentuan garis pangkal;</li> <li>2. Menetapkan ALKI;</li> <li>3. Perlindungan laut territorial;</li> <li>4. Perlindungan ZEEI sebagai economy resources dan parameter pertahanan berlapis;</li> <li>5. Keamanan maritime internasional.</li> </ol>	10%
XV	Mahasiswa mampu memahami tentang kasus kepemilikan pulau-pulau Sipadan dan Ligitan dan Delimitasi Maritim di Ambalat.	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menganalisis kasus kepemilikan pulau-pulau Sipadan dan Ligitan dan Delimitasi Maritim di Ambalat.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan menganalisis materi</li> <li>• Kemampuan menyelesaikan topik secara mandiri</li> <li>• Kemampuan mengemukakan pendapat</li> <li>• Kedisiplinan dan sopan santun</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kuliah Interaktif</li> <li>• <i>Case Study</i></li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Putusan ICJ</li> <li>2. Delimitasi Maritim di Ambalat</li> </ol>	6%
XVI	<b>FINAL TEST</b>		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ketepatan menjawab soal</li> </ul>	UJIAN TERTULIS	<b>FINAL TEST</b>	18%



MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN )	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			• kejujuran			

Disusun oleh:	Diperiksa oleh:		Disahkan oleh:
Dosen Pengampu <b>Fifink Praiseda Alviolita, S.H., MH.</b>	Penanggungjawab Keilmuan	Ketua Program Studi Bagus Anwar H., S.H., M.H., M.Sc.	Dekan Dr. Hartanto, SH, SE, M.Hum.





## Universitas Widya Mataram

PROGRAM STUDI: Hukum

### RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

<b>MATA KULIAH:</b> <b>Hukum Lingkungan</b>	<b>KODE MATA KULIAH:</b>  HKK 406	<b>RUMPUN MATA KULIAH:</b> <b>Kenegaraan</b>	<b>BOBOT (SKS):</b> <b>3 SKS</b>	<b>SEMESTER:</b>  <b>4</b>	<b>TANGGAL PENYUSUNAN:</b> 15 Agustus 2022
<b>OTORISASI</b> Ketua Prodi	<b>DOSEN PENGEMBANG RPS:</b>  1. Teguh Imam Sationo, SH, MSc 2. Fifink Praiseda Alviolita, S.H., M.H	<b>KOORDINATOR RMK:</b>			Kaprodi  Bagus Anwar H., S.H., M.H., M.Sc.
<b>CAPAIAN PEMBELAJARAN</b>	<b>CAPAIAN PEMBELAJARAN PRODI</b>	1. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan 2. Mampu mengembangkan pembelajaran ilmu hukum berbasis riset ilmiah, baik normatif, empirik maupun transendental 3. Mampu mengembangkan keilmuan hukum melalui diseminasi gagasan dan riset ilmiah dengan pendekatan inter atau multidisipliner 4. Mampu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup dan sumber daya alam 5. Mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dibidang hukum sumber daya alam dan mentransformasikan kepada peserta didik			
	<b>CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH</b>	1. Menguraikan mengenai pengertian hukum Lingkungan 2. Menguraikan Permasalahan global lingkungan 3. Menguraikan Pengertian ekosistem dan lingkungan hidup 4. Menguraikan Urgensi lingkungan hidup 5. Menguraikan Hukum kebiasaan internasional 6. Menguraikan Instrument administrasi lingkungan 7. Menguraikan Instrumen ekonomi; perencanaan pembangunan, kegiatan ekonomi, pendanaan, insentif dan disentrif 8. Menguraikan Mekanisme penegakan instrument hukum administratif lingkungan hidup 9. Menguraikan Ragam sanksi administratif 10. Menguraikan instrument hukum perdata lingkungan hidup: 11. Menguraikan Instrumen hukum perdata classs action			

		12. Menguraikan Instrumen hukum perdata legal standing 13. Menguraikan Instrumen hukum pidana lingkungan 14. Menguraikan ADR 15. Menguraikan Arbitrasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa lingkungan diluar pengadilan 16. Menguraikan Gerakan advokasi lingkungan di negara-negara maju dan berkembang serta Permasalahan penegakan hukum lingkungan di era otonomi daerah.
--	--	--

DESKRIPSI SINGKAT MATA KULIAH:	<p>Mata Kuliah ini dirancang untuk mendeskripsikan tentang Hukum Lingkungan yang memiliki sifat lintas bidang, berupa hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Penegakan hukum lingkungan dilakukan melalui lembaga pengadilan dan nonpengadilan melalui lembaga alternatif. Pembaruan hukum lingkungan ke depan diharapkan diakomodasi pemikiran (1) menempatkan masyarakat sebagai stakeholders yang menentukan dalam pengelolaan (sengketa) lingkungan, (2) mempertimbangkan aspek daya dukung ekosistem dan perlindungan fungsi lingkungan hidup dalam setiap keputusan (kebijakan), (3) melakukan restrukturisasi dan rekonsolidasi kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup agar menjadi lebih kokoh dan terintegrasi, dan (4) pengembangan dan penguatan kelembagaan dilakukan dengan kerangka pengembangan good environmental governance.</p>	
MATERI PEMBELAJARAN/POKOK BAHASAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menguraikan mengenai pengertian hukum Lingkungan</li> <li>2. Menguraikan Permasalahan global lingkungan</li> <li>3. Menguraikan Pengertian ekosistem dan lingkungan hidup</li> <li>4. Menguraikan Urgensi lingkungan hidup</li> <li>5. Menguraikan Hukum kebiasaan internasional</li> <li>6. Menguraikan Instrument administrasi lingkungan</li> <li>7. Menguraikan Instrumen ekonomi; perencanaan pembangunan, kegiatan ekonomi, pendanaan, insentif dan disentrif</li> <li>8. Menguraikan Mekanisme penegakan instrument hukum administratif lingkungan hidup</li> <li>9. Menguraikan Ragam sanksi administratif</li> <li>10. Menguraikan instrument hukum perdata lingkungan hidup:</li> <li>11. Menguraikan Instumen hukum perdata classs action</li> <li>12. Menguraikan Instrumen hukum perdata legal standing</li> <li>13. Menguraikan Instrumen hukum pidana lingkungan</li> <li>14. Menguraikan ADR</li> </ol>	
PUSTAKA	UTAMA	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Absori, <i>Hukum Penyelesaian Sengketa Lingkungan</i>, Universitas Muhammadiyah Surakarta Press, Surakarta, 2009.</li> <li>2. Michael G. Faure, <i>Enforcement Issue for Environmental Legislation in Developing Countries</i>, The United Nations University, The Netherlands.2005.</li> <li>3. Nicole Niessen, <i>Decentralized Environmental Management</i>, University of Maastricht, The Netherlands, 2005.</li> </ol>	

	4. David Nicholson, <i>Environmental Litigation Indonesia</i> , Van Vallenhoven Institute for Law and Administration, Leiden, The Netherlands, 2005.
	PENDUKUNG
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hardjasoemantri, Koesnadi, 1999, Hukum Lingkungan, Edisi ke tujuh, cetakan ke empat belas, gadjah mada university press, Yogyakarta.</li> <li>2. Rangkuti, Siti Sundari, 1991, Inovasi Hukum Lingkungan: Dari Ius Contitutum Ke Ius Contituendum, Airlangga University Press, Surabaya.</li> <li>3. Rangkuti, Siti Sundari, 2005, Lingkungan Dan Kebijakan Lingkungan Nasional, Airlangga University Press, Surabaya.</li> <li>4. UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.</li> <li>5. UU No 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja</li> <li>6. Peraturan pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang AMDAL.</li> </ol>
MEDIA PEMBELAJARAN	Powerpoint, Whiteboard, Internet, Jurnal
TEAM TEACHING	-
MATA KULIAH SYARAT	-

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Menjelaskan pengertian ekosistem, lingkungan dan Urgensi lingkungan dan permasalahan-permasalahan Global Lingkungan hidup	<p>Mampu memahami dan menjelaskan seputar:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penger-tian hukum lingkungan;</li> <li>2. Meng-identifikasi, dan member contoh kasus dan per-masalahan ling-kungan global, baik skala lokal, nasional, regional dan inter-nasional</li> <li>3. Meng-identifikasi dan menemukan bahwa</li> </ol>	Portofolio tes essay	Pembelajaran kooperatif, dan diskusi.	Menyajikan tentang <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendahuluan;</li> <li>2. Pengantar mengenai pengertian hukum Lingkungan;</li> <li>3. Permasalahan global lingkungan;</li> </ol>	7%

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		<p>kapitalisme sebagai penyebab utama permasalahan utama lingkungan global;</p> <p>4. Pengertian ekosistem</p> <p>5. Pengertian lingkungan;</p> <p>6. Urgensi lingkungan.</p>			<p>4. Pemutaran video kerusakan lingkungan;</p> <p>5. Pengertian ekosistem;</p> <p>6. Pengertian lingkungan;</p> <p>1. 7. Urgensi lingkungan.</p>	
2	Menjelaskan hukum lingkungan internasional dan tanggung jawab Negara dalam perlindungan lingkungan hidup.	<p>Mampu Menjelaskan dan mengidentifikasi:</p> <p>1. sejarah dan konvensi internasional yang mengatur tentang perlindungan dan pelestarian lingkungan;</p> <p>2. Tanggung jawab Negara/ pihak peratifikasi konvensi internasional tentang perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup.</p>	Portofolio dan tes essay	Pembelajaran kooperatif, dan diskusi.	<p>Menyajikan tentang:</p> <p>1. Hukum kebiasaan internasional;</p> <p>2. Deklarasi Stockholm 1972;</p> <p>a. Konvensi Montevideo 1981;</p> <p>b. Deklarasi Nairobi 1982</p> <p>c. Konvensi Rio 1992;</p> <p>d. Word Summit Substainabel Governance;</p> <p>3. Prinsip-prinsip hukum lingkungan internasional.</p> <p>2.4. Tanggung jawab Negara dalam perlindungan lingkungan.</p>	7%

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Menjelaskan instrumen administrasi lingkungan	Mampu Menjelaskan dan memahami pentingnya instrument administrasi lingkungan sebagai saluran utama yang paling penting dan efektif dalam pencegahan dan penataan kerusakan lingkungan, serta mampu menunjukan dasar hukum berbagai ketentuan instrument admionstrasi dalam UU No. 32 tahun 2009	Portofolio dan tes essay	Pembelajaran kooperatif, diskusi dan latihan	Instrument administrasi lingkungan:  1. Hidden Ordonantie 7 UKL-UPL; 2. AMDAL; 3. Instrumen ekonomi; perencanaan-an pem-bangunan, kegiatan ekonomi, pendanaan, insentif dan disentrif.	7%
4	Menjelaskan penegakan instrument hukum administratif	Mampu Menjelaskan dan memahami penegakan instrument hukum administratif dan macam-macam sanksi dalam instrument administratif	Portofolio tes essay	Ceramah dan diskusi	1.Mekanisme penegakan instrument hukum administratif lingkungan hidup 2. Ragam sanksi administratif	7%
5	Menjelaskan instrument hukum perdata lingkungan hidup	Mampu Menjelaskan instrument hukum perdata lingkungan, baik dasar hukum dalam hukum positif maupun hasil-hasil putusan pengadilan.	Pertofolio Tes essay dan objektif	Ceramah dan diskusi interaktif.	Instrument perdata lingkungan hidup: 1. Dasar hukum instrument perdata; 2. Mekanisme gugatana perdata biasa;	7%

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					3. Kelemahan gugatan perdata biasa; 2. 4. Beban pembuktian gugatan perdata biasa.	
6	Memahami dan menjelaskan instrumen hukum perdata dengan <i>classs action</i> dan penegakannya	Mampu menjelaskan instrumen hukum perdata <i>classs action</i> dan penegakannya, serta dasar hukum yang menjadi landasannya.	Pertofolio Tes essay dan objektif	Ceramah dan diskusi interaktif	1. Instrumen hukum perdata <i>classs action</i> ; 2. Penegakan instrumen hukum perdata dengan <i>class Action</i> ; 3. Contoh kasus gugatan <i>class action</i> .	7%
7	Menjelaskan instrumen hukum perdata dengan <i>Legal Standing</i> dan penegakan-nya.	- Mampu memhami dan menjelaskan instrumen hukum perdata <i>Legal Standing</i> dan penegakannya serta kasus-kasus yang pernah di dilakukan	Pertofolio, Tes essay	Ceramah dan diskusi.	Instrumen hukum perdata dengan <i>legal standing</i> : 1. Latar belakang <i>legal standing</i> ; 2. Dasar hukum <i>legal standing</i> ; 3. Penegakan hukum <i>legal standing</i> 4. Syarat-syarat <i>legal standing</i> 5. Contoh kasus yang digugat dengan instrumen legal standing	7%



MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8	Menjelaskan instrumen hukum pidana dan penegakan-nya	Mampu Menjelaskan instrumen hukum pidana dan penegakannya	Pertofolio, Tes essay	Ceramah dan diskusi interaktif	Instrumen hukum pidana lingkungan. 1.Penegakan hukum pidana; 2.Sistem pembuktian pdiana lingkungan; 3.Macam ppidanaan; 4. <i>Strict liability</i> dalam B3.	7%
9	Menjelaskan ADR dalam penyelesaian sengketa lingkungan	Mampu menjelaskan ADR dalam penyelesaian sengketa lingkungan, mulai dari latar belakang kemunculan-nya, kelebihan dan kekurangan-nya, serta contoh kasus	Portofolio, Tes essay dan objektif	Ceramah dan diskusi interaktif	1. Latar belakang munculnya ADR; 2. Negosiasi dan penegakannya dalam penyelesaian sengketa lingkungan; 3. Mediasi dan penegakannya dalam penyelesaian sengketa lingkungan.	7%

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10	Menjelaskan dan memahami arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa lingkungan diluar pengadilan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mampu Menjelaskan dan memahami arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa lingkungan diluar pengadilan;</li> <li>2. Mengidentifikasi dasar hukum arbitrase;</li> <li>3. Mampu menunjukkan kasus baik internasional, nasional, maupun lokal yang telah diselesaikan dengan arbitrase.</li> </ol>	Pertfolio, Tes essay	Ceramah dan diskusi interaktif	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. arbitrase sebagai alternatif penyelesaian sengketa lingkungan diluar pengadilan;</li> <li>2. Mengidentifikasi dasar hukum arbitrase;</li> <li>3. kasus internasional, nasional, maupun lokal yang telah diselesaikan dengan arbitrase;</li> </ol>	7%
11	Menjelaskan sengketa lingkungan hidup	Mampu Menjelaskan tentang Sengketa lingkungan hidup	Pertfolio, Tes essay	Ceramah dan diskusi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian sengketa lingkungan hidup</li> <li>2. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup</li> </ol>	7%
12	Penegakan hukum lingkungan	Mampu menjelaskan tentang solar time and solar angle, Solar radiation, Solar heating systems	Pertfolio, Tes essay	Ceramah dan diskusi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penegakan hukum lingkungan administratifkeper dataan dan kepidanaan</li> <li>2. Analisis kasus lingkungan hidup dari perspektif aspek hukum</li> </ol>	7%

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN)	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					lingkungan administratifkeper dataan dan kepidanaan	
13	Menjelaskan peran serta masyarakat	Mampu mengetahui peran serta masyarakat lewat advokasi dalam penegakan hukum lingkungan, dan karakteristik gerakan advokasi lingkungan	Pertfolio, Tes essay	Ceramah dan diskusi	Gerakan advokasi lingkungan di negara-negara maju dan berkembang.	7%
14	Menjelaskan permasalahan penegakan hukum lingkungan di era otonomi daerah, dan mendiskusikan tugas review jurnal internasional	1.Mampu mengetahui dan Menjelaskan permasalahan penega-kan hukum lingkungan di era otonomi daerah. 2.Mampu menganalisis penyebab hambatan penegakan hukum lingkungan di era otonomi daerah.	Pertfolio, Tes essay	Presentasi dan diskusi interaktif	1. Permasalahan penegakan hukum lingkungan di era otonomi daerah. 2. Penyebab hambatan penegakan hukum lingkungan di era otonomi daerah.	7%

Disusun oleh:	Diperiksa oleh:		Disahkan oleh:
Dosen Pengampu Fifink Praiseda Alviolita, S.H., MH.	Penanggungjawab Keilmuan	Ketua Program Studi Bagus Anwar H., S.H., M.H, M.Sc.	Dekan Dr. Hartanto,, S.E., S.H., M.Hum.

--	--	--	--





## Universitas Widya Mataram

PROGRAM STUDI: Hukum

### RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH: Kewarganegaraan	KODE MATA KULIAH:	RUMPUN MATA KULIAH: <b>Dasar</b>	BOBOT (SKS): <b>2 SKS</b>	SEMESTER: <b>1</b>	TANGGAL PENYUSUNAN: 15 Agustus 2022
OTORISASI Ketua Prodi	DOSEN PENGEMBANG RPS: Fifink Praiseda Alviolita, S.H., M.H.	KOORDINATOR RMK:			Kaprodi  <b>Bagus Anwar H., S.H., M.H., M.Sc.</b>
CAPAIAN PEMBELAJARAN	CAPAIAN PEMBELAJARAN PRODI	Mahasiswa mampu menjelaskan dan praktek peradilan pidana (BERISIKAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN:)  1. SIKAP 2. KETERAMPILAN UMUM 3. KETERAMPILAN KHUSUS 4. PENGETAHUAN			
	CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH	Membentuk mahasiswa yang sadar bela negara dengan berlandaskan pemahaman politik kebangsaan dan kebudayaan, dengan nilai – nilai demokrasi yang berkarakter untuk membangun bangsa dan negara sesuai marwah Pancasila dan UUD 1945			

DESKRIPSI SINGKAT MATA KULIAH:	Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pelajaran yang menyelenggarakan pendidikan kebangsaan, demokrasi, hukum, multikultural dan kewarganegaraan bagi mahasiswa guna mendukung terwujudnya warga negara
-----------------------------------	--

	yang sadar akan hak dan kewajiban, serta cerdas, terampil dan berkarakter sehingga dapat diandalkan untuk membangun bangsa dan Negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sesuai bidang keilmuan dan profesinya
MATERI PEMBELAJARAN/POKOK BAHASAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perkenalan Sejarah dan Pengertian Negara</li> <li>2. Pancasila dan Implementasinya di Indonesia</li> <li>3. Identitas Nasional dan Nation Building</li> <li>4. Demokrasi dan Implementasinya di Indonesia</li> <li>5. Hak dan Kewajiban Warga Negara</li> </ol>
PUSTAKA	<p>UTAMA</p> <p>Abidin, Andi Zainal. 1983. <i>Persepsi Orang Bugis Makassar tentang Hukum, Negara dan Dunia Luar</i>. Bandung: Alumni</p> <p>Burhan, Wirman. 2014. <i>Pendidikan Kewarganegaraan, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945</i>. Jakarta: Rajawali Pers</p> <p>Chazawi, Adam. 2002. <i>Kejahatan terhadap Keamanan &amp; Keselamatan Negara</i>. Jkrta: Rajagrafindo Persada</p> <p>Gunawan Abd. Hamid, Wawan; Muhammad Abdullah Darras, Ahmad Fuad Hanani (editor). 2015. <i>Fikih Kebangsaan: Pandangan Islam Indonesia tentang Umat, Kewargaan, dan Kepemimpinan Non Muslim</i>. Jakarta: Mizan</p> <p>Hatta, Mohammad. 1988. <i>Mendayung Antara Dua Karang</i>. Jakarta: Bulan Bintang</p> <p>Hatta, Mohammad. 2006. <i>Alam Pikiran Yunani</i>. Jakarta: UI-Press</p> <p>Hazairin, 1985. <i>Demokrasi Pancasila</i> (sumbangan pemikiran bagi LPHN). Jakarta: PT. Bina Aksara</p> <p>Huda, Ni'matul. 2005. <i>Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika</i>. Yogyakarta: Pustaka Pelajar</p> <p>Ikatan Dosen Kewiraan Sulawesi. 1990. <i>Pokok-Pokok Materi Pendidikan Kewiraan</i>. Ujung Pandang: Yayasan Pengembangan Ilmu dan Teknologi (IPTEK College)</p> <p>Kaelan. 2010. <i>Pendidikan Pancasila</i>. Yogyakarta: Paradigma</p> <p>Kaelan dan Achmad Zubaidi. 2007. <i>Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi</i> (Berdasarkan SK Dirjen Dikti No.43/DIKTI/KEP/2006). Yogyakarta: Paradigma</p> <p>Kemhan RI. 2014. <i>Tataran Dasar Bela Negara</i>. Jakarta: Ditjen Pothan Kemenhan RI</p> <p>Konrad Adenauer Stiftung. 2005. <i>Perspektif Baru Melebarkan Sayap: Kumpulan Wawancara Perspektif Baru 2003-2005</i> (ed. Wimar Witoelar). Jakarta: Gramedia Pustaka Pratama</p> <p>Kordinator Dosen Kewiraan Sulawesi Selatan (Kolonel Purn. Rachmat Suparman). <i>Politik dan Strategi Nasional (Polstranas): Petikan dari Diktat Lembaga Pertahanan Nasional</i>. (Rep.790603/3/484)</p> <p>Laboratorium Pancasila IKIP Malang. 1990. <i>Glossarium Sekitar Pancasila</i>. Surabaya: Usaha Nasional</p> <p>Lemhanas dan Ditjen Dikti. 1992. <i>Kewiraan untuk Mahasiswa</i>. Jakarta: Gramedia</p> <p>Mansyur, Hamdan dkk (penyunting). 2002. <i>Pendidikan Kewarganegaraan</i>. Jkrta: Gramedia Pustaka Utama</p> <p>Najib Burhani, Ahmad; Muhd. Abdullah Darras, Ahmad Fuad Hanani (editor). 2015. <i>Muazin Bangsa dari Makkah Darat: Biografi Intelektual Ahmad Syafii Maarif</i>. Jakarta: Serambi Ilmu Semesta</p>

Nafis, M.Cholil. 2015. *Fikih Kebangsaan: Studi Historis dan Konseptual Perlindungan Kehidupan Beragama dalam Negara Bangsa*. Jakarta: Mitra Abadi Press

Natsir, Mohammad. 2014. *Islam sebagai Dasar Negara*. Bandung: Segi Arsy

Pimpinan MPR dan Tim kerja Sosialisasi MPR periode 2009-2014. 2012. *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI

Rahim, Abdul dan Anwar Ibrahim. 2004. *Nilai Demokrasi dalam Budaya Bugis Makassar* (ed. Muhammad Masrury dan Muhammad Ruslan). Makassar: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Sulawesi Selatan

Rasyid, Muhammad Ryass. 1998. *Nasionalisme & Demokrasi Indonesia: Menghadapi Tantangan Globalisasi* (ed. Lamusu Laruhun). Jakarta: PT Yasrif Watampone

Salam, Dharma Setyawan. 2002. *Otonomi Daerah: dalam Perspektif Lingkungan, Nilai, dan Sumber Daya*. Jakarta: Djambatan

Srijanti, A. Rahman H.I. dan Purwanto S.K. 2008. *Etika Berwarga Negara: Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi*. Jakarta: Salemba Empat

Staf Koordinator Dosen Kewiraan Sulawesi Selatan. 1975. *Diktat Kewiraan Paket-1: Pengantar Kuliah Kewiraan, Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional*. SK Gubernur Lemhanas No. 30/X/1975 tanggal 3 Oktober 1975 (Ketua Team Perumus: Brigjen TNI Piet Ngantung)

Sudrajat, A.Suryana. 2006. *Kearifan Guru Bangsa: Pilar Kemerdekaan*. Jakarta: Erlangga

Syarbaini, Syahril (ed). 2005. *Materi Perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)*. Jakarta: Suscadoswar Dikti

Syarbaini, Syahril. 2014. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi: Implementasi Nilai-Nilai Karakter Bangsa*. Bogor: Ghalia Indonesia

Team Dosen. 2002. *Pendidikan Kewarganegaraan Perguruan Tinggi*. Makassar: Ikatan Dosen Kewarganegaraan Sulawesi-Kordinator Kodam VII Wirabuana

Tim Dosen UGM. 2002. *Pendidikan Kewarganegaraan untuk Perguruan Tinggi* (edisi Reformasi). Yogyakarta: Paradigma

Tim Nasional Dosen Pendidikan Kewarganegaraan. 2011. *Pendidikan Kewarganegaraan: Paradigma Terbaru untuk Mahasiswa*. Bandung: Alfabeta

Ubaedillah, A & Abdul Rozak (ed.). 2009. *Pendidikan Kewargaan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani* (edisi Ketiga). Jakarta. ICCE UIN

Winarno. 2007. *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Bumi Aksara- Universitas Sebelas Maret

Yusra, Dhoni (ed). 2007. *Membangun Karakter dan Kepribadian Melalui Pendidikan Kewarganegaraan*. Jakarta: Graha Ilmu

Undang-Undang Dasar 1945 (Hasil Amandemen), terutama Bab X Pasal 27 (3) & Bab XII Pasal 30 (1)

Deklarasi PBB tahun 1948 tentang HAM (U.N. DOC. A/811)



	<p>Keppmendiknas No. 232/U/2000 tgl 20 Desember 2000 tentang <i>Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa</i></p> <p>KepDirjenDikti No. 38 tahun 2002 tgl 18 Juli 2002 tentang <i>Rambu-Rambu Pelaksanaan Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)</i></p> <p>Keppmendiknas No. 45/U/2002 tentang <i>Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi</i></p> <p>Kep Ditjen Dikti Depdiknas No. 43/DIKTI/Kep/2006 tentang <i>Rambu-Rambu Pelaksanaan Kelompok Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian di Perguruan Tinggi</i></p> <p>Peraturan Presiden RI No. 2 tahun 2015 tentang <i>Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2014-2019</i></p> <p>Undang-Undang RI No. 9 tahun 1998 tentang <i>Kebebasan Berpendapat</i></p> <p>Undang-Undang RI No. 39 tahun 1999 tentang <i>Hak Asasi Manusia</i></p> <p>Undang-Undang RI NO. 3 tahun 2002 tentang <i>Pertahanan Negara</i>, terutama pasal 9 (1) &amp; (2)</p> <p>Undang-Undang RI No.20 tahun 2003 tentang <i>Sistem Pendidikan Nasional</i>, terutama Pasal 27 (1) &amp; (2)</p> <p>Undang-Undang RI No. 12 tahun 2006 tentang <i>Kewarganegaraan Republik Indonesia</i></p> <p>Undang-Undang RI NO. 7 tahun 2007 tentang <i>RPJP</i></p> <p>Undang-Undang RI No. 43 tahun 2008 tentang <i>Wilayah Negara</i></p> <p>Undang-Undang RI No. 12 tahun 2012 tentang <i>Pendidikan Tinggi</i> , terutama Pasal 35 (3)</p> <p>Republik Indonesia. 2015. PerPres RI No. 2 tahun 2015. Tentang <i>Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional</i></p>
MEDIA PEMBELAJARAN	LCD, Proyektor, PPT
TEAM TEACHING	-
MATA KULIAH SYARAT	

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN )	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang Perkenalan Sejarah dan Pengertian Negara	Ketepatan menjelaskan pengertian sejarah dan pengertian negara	Kriteria: Ketepatan menjelaskan pengertian  Bentuk penilaian: - Tes tertulis kuis	Contextual learning, Diskusi	1. Pengertian 2. Maksud dan Tujuan Pembelajaran Kewarganegaraan 3. Ruang Lingkup Materi 4. Pengertian dan Teori Negara 5. Unsur Negara 6. Bentuk, Bangunan Negara dan Sistem Pemerintahan Lahirnya NKRI	5%
2	Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguraikan tentang Pancasila dan Implementasinya di Indonesia	Ketepatan menyebutkan implementasi nilai-nilai Pancasila sebagai Ideologi Bangsa	Kriteria: Ketepatan menguraikan  Bentuk penilaian: - Tes tertulis	Contextual learning, Diskusi, Drill and Practice	1. Sejarah Lahirnya Pancasila 2. Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa dan Negara Indonesia Implementasi Pancasila Dalam	5%

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN )	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					Kehidupan Masyarakat	
3	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang Identitas Nasional dan Nation Building	Dapat menjelaskan pengertian identitas nasional dan nation building dalam rangka nasionalisme	Kriteria: Ketepatan Menguraikan unsur-unsur identitas nasional	Contextual learning, Diskusi	1. Pengertian Identitas Nasional 2. Parameter Identitas Nasional 3. Unsur-unsur Pembentuk Identitas Nasional 4. Pengertian Nation Building Nasionalisme	5%
4	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang Demokrasi dan Implementasinya di Indonesia	Ketepatan menyebutkan implementasi demokrasi di Indonesia	Ketepatan menyebutkan implementasi demokrasi di Indonesia serta jenis-jenisnya  Bentuk penilaian: kuis	Contextual learning, Diskusi	1. Sejarah Demokrasi 2. Konsep Demokrasi 3. Prinsip dan Parameter Demokrasi 4. Jenis-jenis Demokrasi	5%

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN )	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					Implementasi Demokrasi di Indonesia	
5	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami serta menguraikan tentang Hak dan Kewajiban Warga Negara	Ketepatan menjelaskan bagaimana hak dan kewajiban sebagai warga negara	Ketepatan menjelaskan bagaimana hak dan kewajiban sebagai warga negara  Bentuk penilaian: FGD	Contextual learning, Diskusi	1. Pengertian Hak dan Kewajiban Warga Negara 2. Asas Kewarganegaraan 3. Masalah Status Kewarganegaraan 4. Hak dan Kewajiban Warga Negara Hak dan Kewajiban Negara atau Pemerintah	5%
6	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang UUD 1945 dan Amandemennya	Ketepatan Menguraikan isi UUD 1945 dan memaknainya dalam kehidupan sehari-hari	Kriteria:  Ketepatan menjelaskan dinamika amandemen UUD 1945  Bentuk penilaian: FGD	Contextual learning, Diskusi	1. Sejarah Lahirnya UUD 1945 2. Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 3. Amandemen UUD 1945 Konflik	5%

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN )	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					Kelembagaan Pasca UUD 1945	
7	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang Hak Asasi Manusia	Ketepatan menjelaskan HAM	Kriteria: Ketepatan merancang  Bentuk penilaian: - Tes tertulis	Contextual learning, Diskusi,	1. Pengertian Hak Asasi Manusia 2. Tujuan Hak Asasi Manusia 3. Perkembangan Pemikiran HAM HAM dan Permasalahannya di Indonesia	5%
8	UTS					10%
9	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang Geopolitik	Ketepatan menguraikan tentang Geopolitik	Kriteria:  Ketepatan Menjelaskan tentang fungsi dan kedudukan di topik Geopolitik  Bentuk penilaian: Kuis	<i>Contextual learning, Diskusi, Drill and Practice</i>	1. Pengertian Geopolitik 2. Latar Belakang Wawasan Nusantara 3. Kedudukan , Fungsi, dan Tujuan 4. Status Wawasan Nusantara	5%

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN )	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					5. Bentuk Wawasan Nusantara 6. Wadah Wawasan Nusantara 7. Isi Wawasan Nusantara 8. Tata Laku Wawasan Nusantara 9. Implementasi Wawasan Nusantara Konsep demokrasi	
10	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang Geostrategi	Mampu menjelaskan mengenai Geostrategi	Kriteria: Ketepatan Menjelaskan Geostrategi Bentuk penilaian: Presentasi	Contextual learning, Diskusi	1. Pengertian Geostrategi/Ketahanan Nasional 2. Latar Belakang Geostrategi/Ketahanan Nasional	5%

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN )	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					3. Tujuan Geostrategi/Ketahanan Nasional 4. Fungsi Geostrategi/Ketahanan Nasional 5. Sifat Geostrategi/Ketahanan Nasional 6. Konsepsi Dasar Geostrategi/Ketahanan Nasional 7. Komponen Strategi Astagatra 8. Hubungan Komponen Astagatra Implementasi Ketahanan Nasional	

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN )	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
11	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang Otonomi Daerah	Ketepatan menjelaskan dan menguraikan tentang Otonomi Daerahnya masing-masing	Kriteria: Ketepatan Menguraikan Otonomi Daerah  Bentuk penilaian: - Tes	Contextual learning, Diskusi	1. Pengertian Otonomi Daerah 2. Latar Belakang Otonomi Daerah 3. Perkembangan UU Otonomi Daerah Permasalahan Otonomi Daerah	5%
12	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang Civil Society (Masyarakat Madani)	Ketepatan menjelaskan dan memahami tentang Civil Society (Masyarakat Madani)	Kriteria: Ketepatan Menjelaskan tentang Civil Society (Masyarakat Madani)  Bentuk penilaian: - Tes tertulis	<i>Contextual learning,</i> <i>Diskusi</i>	1. Sejarah Civil Society 2. Karakteristik Masyarakat Madani Civil Society di Indonesia	5%



MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN )	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
13	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang Good Governance	Ketepatan menjelaskan dan memahami tentang Good Governance	Ketepatan mensimulasikan Good Governance  Bentuk penilaian: Praktik simulasi	<i>Simulasi, FGD</i>	1. Sejarah Good Governance 2. Pengertian dan Konsep Good Governance Prinsip-prinsip Good Governance	5%
14	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang Globalisasi	Ketepatan menjelaskan dan memahami tentang Globalisasi	Kriteria: Ketepatan memberikan contoh dan memahami tentang Globalisasi	<i>Simulasi, FGD</i>	1. Pengertian dan Latar Belakang Globalisasi 2. Tantangan dan Ancaman Globalisasi Indonesia dan Globalisasi	5%
15	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang Politik dan Strategi Nasional	Mahasiswa mampu menjelaskan dan memahami tentang Politik dan Strategi Nasional	Ketepatan menjelaskan dan memahami tentang Politik dan Strategi Nasional  Bentuk penilaian: Presentasi	<i>Diskusi, ceramah</i>	1. Pengertian Polstranas 2. Sistem Manajemen Nasional 3. Implementasi Polstranas sejak 1945	10%

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN )	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
16	UAS					15%

Disusun oleh:	Diperiksa oleh:		Disahkan oleh:
Dosen Pengampu Fifink Praiseda Alviolita, S.H., M.H.	Penanggungjawab Keilmuan	Ketua Program Studi  Bagus Anwar H., S.H., M.H., M.Sc.	Dekan  Dr. Hartanto, SH., SE., M.Hum.



## Universitas Widya Mataram

PROGRAM STUDI: Hukum

### RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

MATA KULIAH: <b>PLKH Pidana</b>	KODE MATA KULIAH: <b>HK602A</b>	RUMPUN MATA KULIAH: <b>Hukum Pidana</b>	BOBOT (SKS): <b>2 SKS</b>	SEMESTER: <b>6</b>	TANGGAL PENYUSUNAN: 15 Agustus 2022
OTORISASI Ketua Prodi	DOSEN PENGEMBANG RPS: Fifink Praiseda Alviolita, S.H., M.H.	KOORDINATOR RMK:			Kaprodi  <b>Bagus Anwar H., S.H., M.H., M.Sc.</b>
CAPAIAN PEMBELAJARAN	CAPAIAN PEMBELAJARAN PRODI	Mahasiswa mampu menjelaskan dan praktek peradilan pidana (BERISIKAN CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN:)  1. SIKAP 2. KETERAMPILAN UMUM 3. KETERAMPILAN KHUSUS 4. PENGETAHUAN			
	CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH	Mahasiswa mampu melakukan praktik Peradilan Pidana yaitu praktik pembuatan Surat Dakwaan, praktik pembuatan Eksepsi, praktik pembuatan Requisitor (Surat Tuntutan), praktik pembuatan Pledoi, praktik pembuatan Replik, praktik pembuatan Duplik, praktik pembuatan Putusan, praktik menyiapkan berkas perkara pidana, dan simulasi persidangan pidana;			

DESKRIPSI SINGKAT MATA KULIAH:	Mata kuliah Pendidikan Latihan dan Kemahiran Hukum adalah mata kuliah pengembangan keterampilan praktik litigasi yakni Praktek Peradilan Pidana,	
MATERI PEMBELAJARAN/POKOK BAHASAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Membuat surat dakwaan dan eksepsi</li> <li>2. Membuat Requisitor/surat tuntutan dan pledoi</li> <li>3. Membuat replik dan duplik</li> <li>4. Membuat putusan</li> <li>5. Simulasi persidangan pidana</li> </ol>	
PUSTAKA	UTAMA	
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tim Laboratorium FH UWM</li> <li>2. R. Soesilo, Hukum Acara Pidana, Politea, Bogor, 1982</li> <li>3. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia, Sumur Bandung, 1978</li> <li>4. Andi Hamzah, Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasarkan Teori dan Praktek, Rineka Cipta, 1994</li> <li>5. M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, 2012</li> <li>6. Jimly Ashidique, Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara, Mahkamah Konstitusi RI, 2016</li> <li>7. Maruar Siahaan, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Konstitusi Press, 2006</li> <li>8. Ali Abdullah, Teori dan Praktik Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Pasca-Amandemen, Prenadamedia Group, 2015</li> <li>9. Munir Fuady, Hukum Kontrak (dari sudut pandang hukum bisnis), Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001</li> </ol>	
	PENDUKUNG	
	Lilik Mulyadi, Hukum Acara Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002	
MEDIA PEMBELAJARAN	LCD, Proyektor, Perlengkapan persidangan	
TEAM TEACHING	-	
MATA KULIAH SYARAT		

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN )	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Mahasiswa mampu menjelaskan alur pra-penuntutan	Ketepatan menjelaskan pengertian dan proses pra-penuntutan	Kriteria: Ketepatan menjelaskan pengertian dan proses pra-penuntutan  Bentuk penilaian: - Tes tertulis kuis tentang materi pra-penuntutan	Contextual learning, Diskusi	- Pengertian pra-penuntutan  - Kegiatan pra-penuntutan	5%
2	Mahasiswa mampu merancang Surat Dakwaan	Ketepatan merancang bentuk/ format dan isi Surat Dakwaan	Kriteria: Ketepatan menguraikan isi Surat Dakwaan dan unsur-unsur pidana termasuk uraian delik pidana  Bentuk penilaian: - Tes tertulis Membuat Surat Dakwaan	Contextual learning, Diskusi, Drill and Practice	- Jenis-jenis Surat Dakwaan - Unsur-unsur Surat Dakwaan - Bentuk/ format Surat Dakwaan - Isi Surat Dakwaan - Uraian delik Pidana	5%

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN )	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3	Mahasiswa mampu merancang eksepsi	Ketepatan merancang bentuk/ format dan isi Eksepsi	Kriteria: Ketepatan menguraikan isi Eksepsi dan alasan eksepsi Bentuk penilaian: - Tes tertulis Membuat Eksepsi	Contextual learning, Diskusi, Drill and Practice	- Alasan eksepsi - Tata cara pengajuan eksepsi - Jenis -jenis Eksepsi - Bentuk/ format Eksepsi - Isi Eksepsi	5%
4	Mahasiswa mampu merancang Surat Tuntutan Jaksa dalam praktik peradilan pidana	Ketepatan merancang Surat Tuntutan Jaksa	Kriteria : Ketepatan membuat Surat Tuntutan pidana dan menggunakan aturan hukum Bentuk penilaian: - Tes tertulis	Contextual learning, Diskusi, Drill and Practice	- Tata cara pengajuan tuntutan pidana - Unsur	5%

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN )	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			membuat Surat Tuntutan Jaksa		-unsur Surat Tuntutan Jaksa - Bentuk/ format Surat Tuntutan Jaksa - Isi Surat Tuntutan Jaksa	
5	Mahasiswa mampu merancang Nota Pembelaan (Pledoi)	Ketepatan merancang Nota Pembelaan (Pledoi)	Kriteria: Ketepatan membuat Pledoi dan menggunakan aturan hukum Bentuk penilaian: - Tes tertulis membuat Pledoi	Contextual learning, Diskusi, Drill and Practice	- Tata cara pengajuan pledoi - Unsur-unsur pledoi - Bentuk/ format pledoi	5%

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN )	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					- Isi pledoi	
6	Mahasiswa mampu merancang Replik dalam perkara pidana	Ketepatan merancang bentuk/ format dan isi Replik	Kriteria: Ketepatan merancang Replik	Contextual learning, Diskusi, Drill and Practice	- Pengertian Replik - Struktur isi Replik - Teknik menyusun Replik	5%
7	Mahasiswa mampu merancang Duplik dalam perkara pidana	Ketepatan merancang bentuk/ format dan isi Duplik	Kriteria: Ketepatan merancang Duplik Bentuk penilaian: - Tes tertulis Membuat Duplik	Contextual learning, Diskusi, Drill and Practice	- Pengertian Duplik - Struktur isi Duplik - Teknik menyusun Duplik	5%
8	Ujian Tengah Semester					10%
9	Mahasiswa mampu	Ketepatan	Kriteria:	<i>Contextual</i>	- Jenis-jenis	5%



MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN )	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	merumuskan putusan hakim dalam perkara pidana	merumuskan putusan hakim dalam perkara pidana	Ketepatan merumuskan putusan hakim dalam perkara pidana	<i>learning, Diskusi, Drill and Practice</i>	putusan hakim dalam perkara pidana - Teknik merumuskan putusan hakim dalam perkara pidana	
10	Mahasiswa mampu menyiapkan berkas persidangan perkara pidana	Kelengkapan Berkas persidangan perkara pidana	Kriteria: ketepatan membuat surat-surat dalam berkas persidangan pidana Bentuk penilaian: Penyusunan berkas perkara	Contextual learning, Diskusi, Drill and Practice	- Struktur isi berkas persidangan perkara pidana - Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan (SPDP) - Surat Perintah	5%

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN )	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			pidana		Penyidikan - Laporan Polisi	
11	Mahasiswa mampu menerapkan teknik persidangan perkara pidana	Ketepatan menerapkan teknik persidangan pidana	Kriteria: Ketepatan menerapkan teknik persidangan pidana Bentuk penilaian: - Tes: simulasi persidangan perkara pidana	Contextual learning, Diskusi	- Jenis-jenis upaya hukum - Tata cara pengajuan upaya hukum	5%
12	Mahasiswa mampu merancang Surat Kuasa	Ketepatan merancang bentuk/ format dan isi Surat	Kriteria: Ketepatan merancang	<i>Contextual learning, Diskusi, Drill and Practice</i>	- Jenis-jenis Surat Kuasa - Bentuk/ format Surat	5%

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN )	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
		Kuasa	Surat Kuasa  Bentuk penilaian: - Tes tertulis Membuat Surat Kuasa		Kuasa - Isi Surat Kuasa	
13	Mahasiswa mampu mensimulasikan sidang Pidana tahap pembacaan dakwaan	Ketepatan mensimulasikan sidang Pidana	Ketepatan mensimulasikan sidang Pidana	<i>Tuga:: Simulasi sidang</i>	teknik persidangan pidana di tahap pembacaan dakwaan	5%
14	Mahasiswa mampu mensimulasikan sidang Pidana di tahap pemeriksaan saksi	Ketepatan mensimulasikan sidang Pidana di tahap pemeriksaan saksi	Kriteria: Ketepatan mensimulasikan sidang Pidana di tahap	<i>Simulasi sidang</i>	teknik persidangan pidana di tahap pemeriksaan saksi	5%

MINGGU KE	SUB CP MK (SEBAGAI KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN )	INDIKATOR	KRITERIA DAN BENTUK PENILAIAN	METODE PEMBELAJARAN	MATERI PEMBELAJARAN	BOBOT PENILAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	pemeriksaan saksi		pemeriksaan saksi			
15		Mahasiswa mampu mensimulasikan sidang pidana di tahap pembacaan tuntutan dan putusan	Ketepatan mensimulasikan sidang pidana di tahap pembacaan tuntutan dan putusan	<i>Kriteria: Ketepatan mensimulasikan sidang Pidana ditahap pembacaan tuntutan dan putusan</i>	teknik persidangan pidana di tahap pembacaan tuntutan dan putusan	10%
16	Ujian Akhir Semester					15%

Disusun oleh:	Diperiksa oleh:		Disahkan oleh:
Dosen Pengampu Fifink Praiseda Alviolita, S.H., M.H.	Penanggungjawab Keilmuan	Ketua Program Studi  Bagus Anwar H., S.H., M.H., M.Sc.	Dekan  Dr. Hartanto, SH., SE., M.Hum.